



## Pelayanan Sosial Berbasis Aset Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember

### *Asset-Based Social Services for Vulnerable People After Covid-19 in Jember*

Budhy Santoso<sup>1</sup>, Atik Rahmawati<sup>2\*</sup>, Belgis Hayyinatun Nufus<sup>3</sup>, Najmudil Akbar Kadafi<sup>4</sup>, Achmad Sofri Nugroho<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember

\*E-mail: : atik.fisip@unej.ac.id

---

#### Abstrak

Pemulihan bidang kesehatan masih menjadi prioritas kebijakan pasca covid-19, sehingga pelayanan sosial PPKS lebih pada bantuan sosial yang bersifat charity dan kurang memfokuskan pada aspek pemberdayaan. Bantuan lebih pada program yang bersifat sporadis dan cenderung tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Disisi lain, komunitas memiliki aset yang berlimpah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaksana dalam pelayanan sosial khususnya bagi PPKS. Sebagai Kabupaten dengan jumlah PPKS terbanyak di wilayah tapal kuda, pemanfaatan aset komunitas dalam pelayanan sosial PPKS menjadi strategi *alternative* dalam mencapai keberlanjutan program. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji *Sustainable Social Services* berbasis aset dalam meningkatkan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pasca Covid-19 di Kabupaten Jember. Fenomena dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik penentuan informan snowball, dengan key informan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada tiga aset komunitas yang dimanfaatkan diantaranya aset personal, institusi, dan asosiasi. Dari aset institusi menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan BAPAS II Jember merupakan leading sector pelayanan social PPKS. Namun demikian, tidak ada sinergi keduanya dalam pelaksanaan pelayanan social. Bupati sebagai pemimpin daerah dan penentu otoritas dapat memainkan peran sebagai "Gapper" mensinergikan asset komunitas melalui kebijakan social PPKS yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Pelayanan Sosial, Aset Komunitas, Pasca Covid-19, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.*

#### Abstract

*Recovery in the health sector is still a post-covid-19 policy priority. Social services to the "Need for Social Welfare Services" focus more on charity social assistance and less on empowerment. Assistance is more for sporadic programs and tends not to consider sustainability aspects. On the other hand, the community has excellent assets that implementers can utilize in social services. As a district with the most significant number of beneficiaries in "the horseshoe" area, using community assets in social services is an alternative strategy for achieving program sustainability. This study examines Asset-Based Sustainable Social Services in Improving Empowerment of "Necessary Social Welfare Services" Post Covid-19 in the Jember Regency. The phenomenon was analyzed using a qualitative approach, with the technique of determining informants using snowball, with the key informant, the Head of the Jember District Social Service. The study results show that three community assets are utilized, including personal assets, institutions, and associations. Institutional assets show that the Social Service and BAPAS II Jember are the leading social service sectors. However, there is no synergy between the two in implementing social services. As a regional leader and authority determiner, the district head can play the role of a "Gapper", synergizing community assets through sustainable social policies.*

**Keywords:** *Social services, Sustainability, Post Covid-19, Community Assets, Vulnerable People.*

---

**Cara citasi :** Santoso, Budhy,. dkk. (2023). Pelayanan Sosial Berbasis Aset Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 4 No 1 Maret 2023, 27-39.*

---

## **PENDAHULUAN**

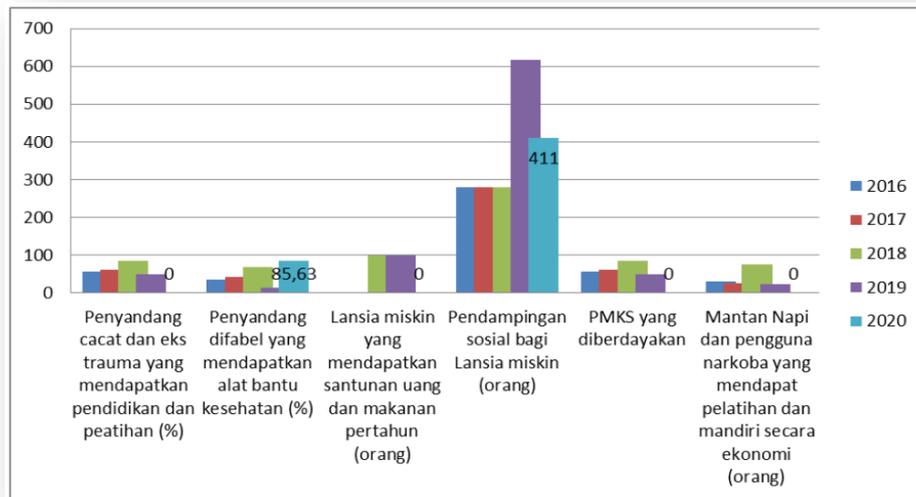
Wabah Coronavirus 2019 (COVID-19) memberikan dampak ekonomi yang buruk bagi dunia sehingga menyebabkan resesi global dan menjadikan jutaan orang menjadi miskin (Suryahadi et al., 2020). Bagi Indonesia, COVID-19 dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menyumbang pada peningkatan angka kemiskinan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat bahwa terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi hingga minus 5,32% pada kuartal ke 2 tahun 2020. Sektor ekonomi rumah tangga menjadi satu yang paling berdampak (LIPI, 2021). Karakteristik utama yang paling terdampak dari Covid-19 adalah masyarakat miskin, rentan miskin, dan mereka yang bekerja di sektor informal (Statistik, 2020).

Dalam paradigma pelayanan sosial, masyarakat miskin dan rentan miskin disebut negara sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Kemensos RI, 2019) atau dalam nomenkatur sebelumnya disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Kemensos RI, 2012). Kondisi hidup yang rentan baik secara sosial, ekonomi menjadikan PPKS termasuk dalam kelompok sasaran dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berhak mendapatkan keadilan sosial dan perlindungan akan terjaminnya pemenuhan kesejahteraan hidup oleh Negara.

Pelayanan sosial kepada PPKS adalah kewajiban Negara, sebagaimana amanat UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 4 dan pasal 5 bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab Negara dengan prioritas pada mereka yang hidup tidak layak dan memiliki permasalahan sosial yaitu mereka yang miskin, terlantar, disabilitas, terpencil, tuna sosial dan mental disorder, mereka yang karena bencana, dan kelompok minoritas (Pemerintah RI, 2009).

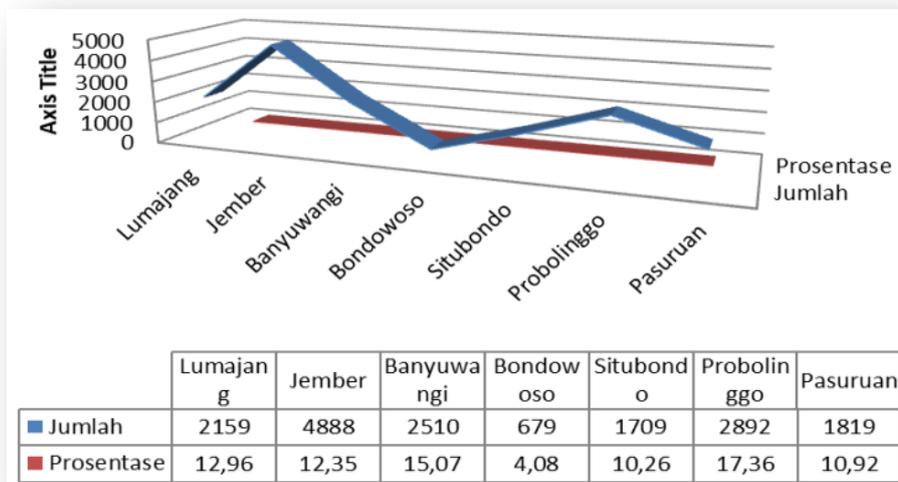
Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan sosial oleh Negara memiliki keterbatasan (Rahmawati et al., 2021). Kondisi ini berpengaruh terhadap kehadiran Negara dalam memberikan pelayanan sosial. Pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah untuk mengubah fokus alokasi anggaran. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana disebutkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 tahun (RPJMD) tahun 2021 sampai dengan 2026 terlihat dari perkembangan indikator dibidang pemberdayaan sosial pada tahun 2020 terjadi rebudgeting penurunan anggaran program pemberdayaan untuk PPKS dan refocusing pada penanganan Covid19, sebagaimana berikut;

Tabel 1. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Sosial Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Gambar 1. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Sosial Kabupaten Jember Tahun 2016-2020  
(Sumber: RPJMD Tahun 2021–2026, 2019)

Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian dengan mendasar pada data dari BPS Jawa Timur tahun 2019 sebagai wilayah di daerah Besuki yang memiliki jumlah PPKS terbanyak. Sebagaimana data BPS Provinsi Jawa Timur dibawah ini;



Gambar 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota  
(Sumber: BPS)

Data BPS tersebut diatas menunjukkan bahwa PPKS di Kabupaten Jember menempati posisi terbanyak di wilayah Besuki Raya dengan jumlah 4.888 atau sekitar 29,35% dari 4 jumlah PPKS yang ada di wilayah tapal kuda. Wilayah tapal kuda teridentifikasi sebagai daerah yang berada di Kabupaten Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan.

Berdasar RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026, pemerintah menjalankan VISInya yaitu: “Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”. Strategi yang dilakukan melalui kebijakan “Gerakan Desa Jember Berdaya atau Gerda Jaya”, dengan program unggulan khususnya terkait PPKS yaitu (Pemda Kab. Jember, 2021);

1. *Wes Wayae* Jember yaitu memberdayakan PPKS dengan kegiatan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) daerah.
2. *Wes Wayae* Jember Merehabilitasi PPKS; dengan kegiatan;
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas, Anak-anak, Lanjut Usia, serta Gelandangan dan Pengemis yang terlantar di Luar Panti.
  - Rehabilitasi PPKS untuk mereka yang bukan pecandu HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti.
  - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
3. *Wes Wayae* Jember Memberikan *social protection* serta *social security* bagi PPKS dengan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.

Karakteristik PSKS sebagaimana UU kesejahteraan sosial terdiri atas nilai-nilai kejuangan, pahlawan, perintis, *social solidarity* dan *local wisdom*, peran serta *Non Governmental Organizations* (NGO), relawan sosial, *Corporate social Responsibility* (CSR), *fund raising*, dan aksesibilitas pelayanan kesejahteraan sosial (Pemerintah RI, 2009). Dalam perspektif *Assets Based Community Development* (ABCD) sebut juga sebagai aset komunitas (Kretzmann & Mcknight, 1993).

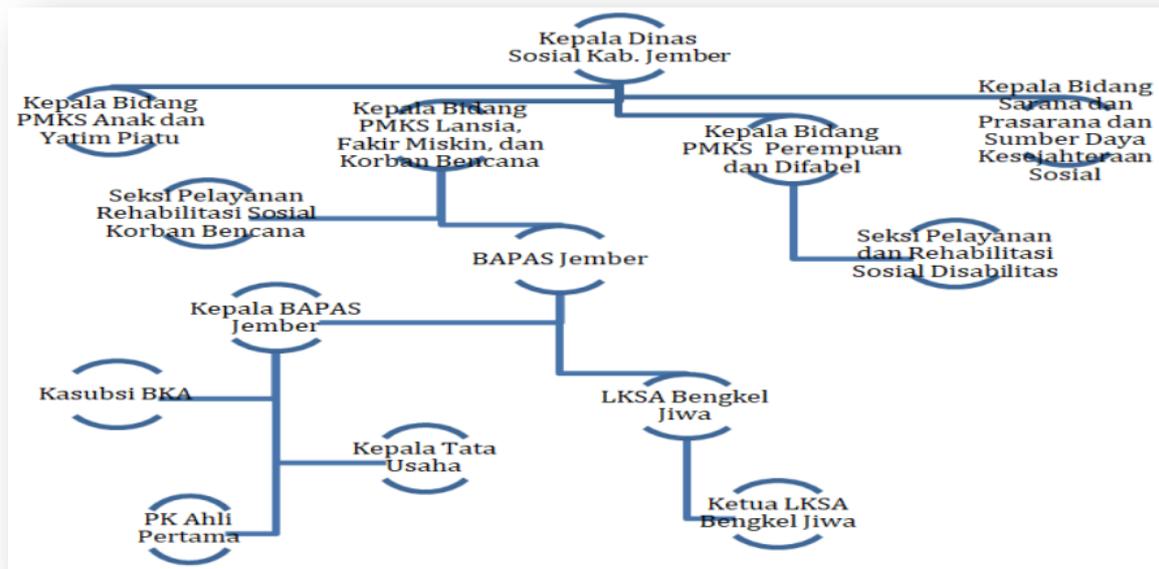
Strategi ini memberikan peluang pelayanan sosial kepada PPKS secara berkelanjutan. *Sustainable social services* menjadi isu penting bagi pembangunan masyarakat di dunia termasuk Negara Indonesia yang tertuang dalam 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) (BPPPS Kemensos RI, 2022; Kementerian PPN/ Bappenas). Pendekatan berbasis aset mengidentifikasi, dan memanfaatkan aset yang ada dan berlimpah di masyarakat (Kretzmann & Mcknight, 1993). Kebijakan sosial berbasis aset mengidentifikasi dan berfokus pada akumulasi aset dalam masyarakat sebagai prasyarat pemberdayaan. Ketika aset terungkap, dan terkumpul sehingga dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup serta impian komunitas (Dureau, 2013; Moser & A. Dani, 2008). Pemanfaatan aset komunitas dalam proses pelayanan sosial akan memberikan manfaat pada perluasan aset yang tidak hanya

dikhususkan pada penerima manfaat tetapi juga lingkungan sekitar akan memberikan jaminan pada keberlanjutan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Rahmawati et al., 2021). Kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan suatu tatanan kehidupan dimana permasalahan sosial terkendali, kebutuhan sosial tersedia dan peluang untuk kemajuan sosial terbuka (Midgley, 1995). Untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial, perlu adanya pelayanan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengatasi permasalahan sosial di masyarakat, serta terpenuhi kebutuhan hidup individu maupun keluarga, dan serta komunitas (Adi, 2013). Berdasar pada latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Pelayanan Sosial berbasis aset bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pasca Covid-19 di Kabupaten Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian dirancang dengan metode kualitatif yang menekankan pada *case study*. Riset kualitatif menekankan realitas yang terbangun secara sosial, teguh pada posisi yang emis yaitu menemukan fakta-fakta 'apa adanya' dan bukan 'apa yang seharusnya' serta hubungan erat antara peneliti dan subjek yang dikaji sehingga menghasilkan kajian yang holistik, mendalam dan komprehensif. Analisa penelitian kualitatif dengan teknik tematik sehingga tersaji dalam bentuk narasi sederhana dan mudah difahami untuk memperjelas kompleksitas persoalan dalam penelitian. Penelitian kualitatif melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap kasus-kasus yang muncul dalam alur kehidupan sosial alamiah (*in the natural flow of social life*) serta memberikan interpretasi autentik pada konteks sejarah sosial tertentu (*specific social historical contexts*) (Creswell, 2009; Denzin & Lincoln, 2009; Miles et al., 2014; Neuman, 2014; Yin, 2018).

Kasus tunggal (*a single-case study*) yaitu pelayanan sosial berbasis aset komunitas bagi PPKS pasca COVID-19 di Kabupaten Jember. Pemilihan informan dengan teknik bola salju dan informan kunci dari leading sector penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai leading sector pemberdayaan PPKS di Kabupaten Jember. Informan penelitian tergambarkan dalam sosiogram dibawah ini;



Gambar 3. Bagan Alur Mendapatkan Informasi dan Data Penelitian

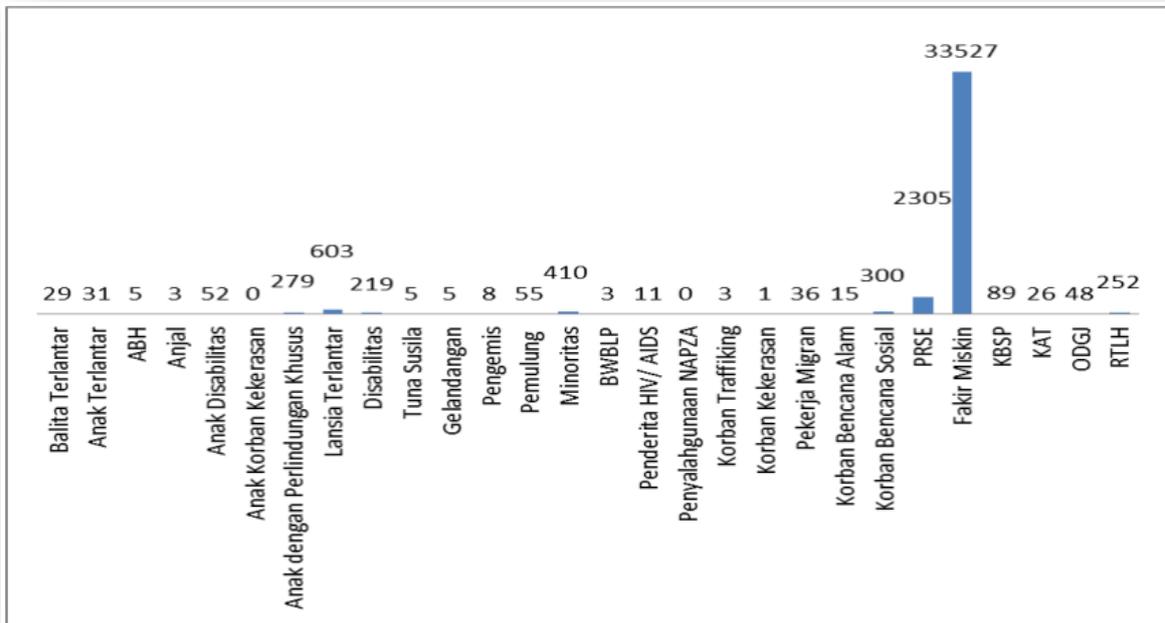
Analisis data menggunakan jenis tematik, dan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber (Creswell, 2013; Patton, 2014). Melakukan Crosscheck data dengan cara membandingkan sumber satu dengan sumber lain. Triangulasi sumber data dan perspektif analitis untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas temuan, mencakup nilai kebenaran dan kemungkinan temuan kredibilitas, ketidakberpihakan, dan independensi penilaian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pademi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi meningkat. BPS mencatat bahwa di bulan Maret 2021 jumlah orang miskin mencapai 257.090 orang atau sekitar 10,41%. Pandemi juga menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. BPS mencatat bahwa dari 1,34 juta angkatan kerja, 5,44% berada pada kondisi tingkat pengangguran terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat 5 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja, atau naik 0,31% disbanding dengan tahun sebelumnya. Realitas tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelayanan sosial yang harus diberikan oleh pemerintah.

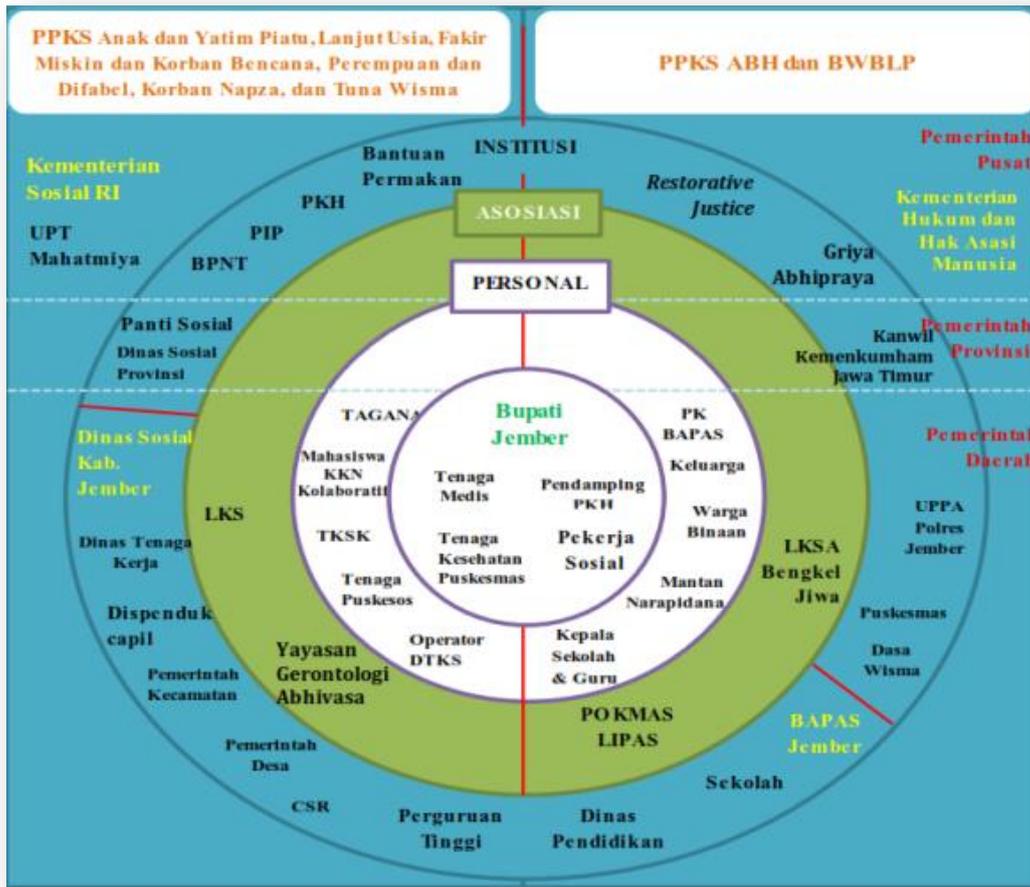
*Leading sector* pelayanan sosial bagi PPKS di Kabupaten Jember adalah Dinas Sosial sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan organisasi Dinas Sosial sebagai perumus, pelaksana kebijakan, evaluator dan pelaporan, admisnistrasi bidang sosial (Sekretaris Dinas Sosial, 2022). Pelayanan sosial bagi PPKS merujuk pada Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) (K. B. D. S. Jember, 2022). Data berasal dari usulan yang selanjutnya akan diverifikasi dan validasi untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi DTKS.



Gambar 4. Karakteristik Kriteria PPKS usulan Google Form (18 Oktober 2022)

Usulan data memberikan perubahan yang signifikan terhadap identifikasi jenis PPKS yang ada di Kabupaten Jember. Kriteria PPKS yang muncul dari proses usulan melalui google form salah satunya adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai PPKS yang ada di Kabupaten Jember. Karakteristik PPKS sebagai penerima manfaat pelayanan sosial dari Dinas Sosial sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing bidang yaitu; Bidang 1 terkait dengan PPKS Anak dan Yatim Piatu, Bidang 2 terkait dengan PPKS Lanjut Usia, Fakir Miskin dan Korban Bencana, dan Bidang 3 terkait dengan PPKS Perempuan dan Difabel, Korban Napza, dan Tuna Wisma (Sekretaris Dinas Sosial, 2022). DTKS juga memberikan pemahaman adanya PPKS yang tidak dalam kriteria penerima manfaat pelayanan sosial dari Dinas Sosial yaitu ABH dan BWBLP. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengidentifikasi aset komunitas, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial. Ada tiga aset komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial yaitu human atau personal, institusi, dan asosiasi (Kretzmann & Mcknight, 1993). *Mapping* aset komunitas sebagai PSKS pelayanan sosial PPKS dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;



Gambar 5. Bagan Mapping Aset Komunitas Sebagai PSKS bagi pengembangan pelayanan sosial PPKS yang berkelanjutan

Aset institusi yang berperan penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan bagi PPKS pada tingkat pemerintah pusat adalah Kementerian Sosial (kemensos) dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Permakanan untuk Lanjut Usia, serta Unit Pelaksana Teknis Mahatmiya yang berkedudukan di Bali. Institusi kedua adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan program keadilan restoratif (*Restorative justice*), serta program Griya Abhipraya (F. B. I. Jember, 2022; K. B. D. S. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022).

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Panti Sosial, serta Kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur merupakan aset institusi pada tingkatan pemerintah Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten terdapat dua lembaga yaitu: Dinas Sosial (Dinsos) yang memberikan pelayanan sosial kepada PPKS anak dan yatim piatu, lanjut usia, fakir miskin, korban bencana, perempuan, difabel, korban napza, dan tuna wisma (K. B. D. S. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022); serta Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II yang memberikan pelayanan sosial kepada ABH, dan BWBLP (K. B. I. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022).

Aset Institusi sebagai *supporting system* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan (Dispendik), Sekolah, dan Perguruan Tinggi (K. B. D. S. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022). *Partnership* dapat dilakukan dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai legalitas sekaligus memberikan *privilege* atau hak khusus bagi PPKS untuk dapat mengakses pelayanan sosial dari institusi. Aset Institusi yang secara khusus sebagai *supporting system* dalam pelayanan sosial bagi PPKS ABK dan BWBLP adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Jember, Puskesmas, dan pada tingkatan Rukun Tetangga terdapat Dasa Wisma (F. B. I. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; P. B. I. Jember, 2022).

Aset Asosiasi dalam hal ini adalah organisasi sosial masyarakat, menjadi mitra strategis dalam pelayanan sosial bagi PPKS. Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan karena didukung oleh komitmen organisasi sosial masyarakat (NGO). NGO yang memiliki program serupa mempunyai limpahan sumber daya manusia, pendanaan, serta intervensi sosial yang terencana. Sinergitas kegiatan memberikan peluang bagi tercapainya tujuan pelayanan sosial serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pemberdayaan (Kretzmann & Mcknight, 1993; Nursansiwati & Hidayat, 2022; Rachman & Syamsuddin, 2018; Rahmawati, 2011). Aset Asosiasi yang dapat dimanfaatkan sebagai PSKS dalam pelayanan sosial kepada PPKS antara lain; Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Bengkel Jiwa (Rahmawati & Mayangsari, 2022), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Yayasan Gerontologi Abhiyasa.

Aset Personal yang dapat menjadi PSKS bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial PPKS yaitu Bupati, sebagai kepala pemerintahan daerah di Kabupaten Jember. Bupati sebagai tokoh sentral yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan sosial yang berpihak dan responsive pada PPKS, diantaranya; Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Adanya RIKSD (Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Bupati dapat memainkan perannya sebagai "*gappers*". *Gappers* adalah seseorang yang

*responsive* dengan kebutuhan komunitas, memiliki hati yang berpihak pada komunitas meskipun bekerja di dalam pemerintah. *Gappers* juga menjadi jembatan antara asosiasi, institusi, dan masyarakat (Kretzmann & Mcknight, 1993; Rahmawati et al., 2021). Aset personal lain adalah pendamping PKH. Pendamping PKH sebagai *community worker* merupakan mitra dan menjembatani pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PPKS (Alamin, 2010; Rahmawati & Kisworo, 2017). Dalam bidang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan aset personal yang memberikan dukungan bagi Dinsos untuk memberikan layanan kesehatan bagi PPKS. Aspek kesehatan merupakan salah satu syarat bagi mewujudkan kesejahteraan sosial penerima manfaat pelayanan sosial (Midgley, 1995; Ndakularak et al., 2014). Praktek pekerjaan sosial yang profesionalitas, perencanaan terpadu yang berkualitas serta *sustainability* dalam perbaikan dan peningkatan kualitas hidup dan *social functioning* PPKS menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah sosial (Pemerintah RI, 2012, 2019). Dalam posisi ini, peran pekerja sosial (*social worker*)(Rahmawati & Mayangsari, 2022) penting sebagai *agent of change* yang merupakan aset personal dalam pembangunan masyarakat.

Rencana kinerja tahunan (RKT) dinas sosial tahun 2022 menyebutkan bahwa ada 6.000 orang PSKS dan 16 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Mereka adalah aset personal yang menjadi PSKS diantaranya TAGANA atau Taruna Siaga Bencana, TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, operator DTKS, serta tenaga PUSKESOS. Selain itu, perjanjian kerjasama dengan Perguruan Tinggi memberikan tambahan akumulasi aset personal dengan kehadiran mahasiswa terlibat dalam pelayanan sosial PPKS. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Praktikum, Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) menjadi wujud nyata partisipasi mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. Pelayanan sosial ABH berpedoman pada *restorative justice* berpihak pada hak dan kebutuhan anak, perlindungan dari diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak melalui pelayanan yang memprioritaskan *pada the best interest for the child* (Rahmawati & Mayangsari, 2022). Aset personal yang dapat dimanfaatkan menjadi PSKS dalam pelayanan sosial yaitu PK BAPAS, Kepala Sekolah/ Guru, Warga Binaan, Mantan Narapidana (F. B. I. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; P. B. I. Jember, 2022).

## **SIMPULAN**

Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi PPKS secara karakteristik merujuk pada DTKS. *Leading Sector* implementor pelayanan sosial PPKS di Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Namun demikian, tidak semua PPKS yang teridentifikasi dalam DTKS merupakan penerima manfaat pelayanan sosial dari Dinas Sosial. ABH merupakan salah satu karakteristik PPKS dengan *leading sector* pelaksana adalah BAPAS kelas II Jember. Tiga aset komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai PSKS pelayanan sosial untuk PPKS yaitu aset personal, institusi, dan asosiasi. Kedua lembaga tersebut merupakan aset institusi yang masing-masing memiliki sumber daya yang melimpah baik aset personal, institusional, maupun aset asosiasi. Namun demikian, secara implementatif, pelaksanaan pelayanan sosial untuk PPKS tidak tersinergi. Usaha sinergis dapat dilakukan oleh Bupati dengan perannya sebagai “*Gappers*”. Aset komunitas lain yang belum dimanfaatkan dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi PPKS adalah pembentukan Griya Abhipraya, LIPOSOS, serta PUSKESOS sebagai pusat intervensi bagi PPKS.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Jember, Ketua LP2M, Dekan Fisip, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kepala BAPAS Jember dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Dukungan yang telah diberikan mampu memberikan ruang aktualisasi akademik yang semakin memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian Hibah Kelompok Riset dan Pengabdian Masyarakat Jurusan “Welfare And Sustainable Development (WeSave) sesuai dengan SPK Jember No: 4048/UN25.3.2/LT/2022 tertanggal 27 juli 2022.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Alamin, A. R. (2010). *Analisis peran pendamping dalam program keluarga harapan (PKH) pada suku dinas sosial Jakarta Utara*.
- BPPPS Kemensos RI. (2022). *Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) DAN Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*. [bppps.kemensos.go.id](https://bppps.kemensos.go.id). Retrieved 5 Juni 2022 from [https://bppps.kemensos.go.id/bahan\\_bacaan/file\\_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf](https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf)
- Creswell, j. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Third ed.)*. SAGE publications Inc.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition ed.)*. SAGE Publications, Inc

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research (Dariyatno, B. S. Fata, Abi, & J. Rinaldi, Trans.)*. Penerbit Pustaka Pelajar. (SAGE Publications Pvt. Ltd.)
- Dureau, C. (2013). *Pembaharu dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan*. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II.
- Jember, F. B. I. (2022, 9 Desember 2022). Penggalan Data [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. B. D. S. (2022, 12 Oktober 2022). Penggalan Data [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. B. I. (2022, 5 Desember 2022). Penggalan Data [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. T. B. I. (2022, 5 Desember 2022). Penggalan Data [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, P. B. I. (2022, 5 Desember 2022). Penggalan Data [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (2012). Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, (2019).
- Kementerian PPN/ Bappenas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Kementerian PPN/ Bappenas. Retrieved from [http://sdgs.bappenas.go.id/sekilassdgs/#:~:text=Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20\(TPB,lingkungan%20hidup%20serta%20pembangunan%20yang](http://sdgs.bappenas.go.id/sekilassdgs/#:~:text=Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20(TPB,lingkungan%20hidup%20serta%20pembangunan%20yang) 3 Februari
- Kepala Bidang 1, D. S. J. (2022, 18 Oktober 2022). Penggalan Data [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Kepala Bidang 3, D. S. J. (2022, 26 Oktober 2022). Penggalan Data [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Kretzmann, J. P., & Mcknight, J. L. (1993). *Building Communities From The Inside Out: A Path Toward Finding And Mobilizing A Community Assets*. ACTA Publications.
- LIPI. (2021). *Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Retrieved 6 Maret from <http://lipi.go.id/siaranpress/surveidampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications Ltd.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook (Third Edition ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- moser, C., & A. Dani, A. (2008). *Assets, Livelihoods, and Social Policy*. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.
- Ndakularak, E., Setiawina, N. D., & Djayastra, I. K. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(3), 140-153.
- Neuman, W. L. (2014). *Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches (Third Edition ed.)*. Pearson Education Limited
- Nursansiwati, D. A., & Hidayat, R. (2022). Studi Pemberdayaan Sosial NGO di Desa Tertinggal. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice / Michael Quinn Patton.—Fourth edition*. SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026,
- Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang (UU) No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang (UU) No 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Rachman, M. A., & Syamsuddin, S. (2018). Increasing the Role of Social Mobilization in Forming Synergies between Government and Non-Governmental Organizations (NGOs) in Efforts to Empower Economy in Underdeveloped Regions [Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal]. *Proceeding of Community Development*, 1, 135-145.
- Rahmawati, A. (2011). *Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT); Studi pada komunitas suku laut di pulau Batam-(Kota Batam)*. Universitas Indonesia]. Depok. [www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20233694&lokasi=lokal](http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20233694&lokasi=lokal)
- Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2022). PERAN PEKERJA SOSIAL KOREKSIONAL DALAM REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LKSA BENGKEL JIWA KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 4(1).
- Rahmawati, A., Salam, A., & Kurniawan, L. J. (2021). *Paradigma Negara Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Sosial Berkelanjutan, Pembangunan Inklusi, dan Keadilan Sosial*. intrans publishing.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161-169.

- Sekretaris Dinas Sosial, J. (2022, 12 Oktober 2022). *Observasi dan Penggalan data awal [Interview]*. LP2M Universitas Jember.
- Statistik, B. P. (2020). *Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19*. In: Jakarta: Subdirektorat Indikator Statistik.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The impact of COVID-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia*. The SMERU Research Institute.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (Sixth Edition ed.)*. SAGE Publications, Inc.